

**RENCANA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021**

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I. ....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II. ....	7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja.....	7
2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup .....	32
BAB III.....	34
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	34
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup .....	35
BAB IV.....	39
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD .....	39
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	39
4.2 Prakiraan maju pendanaan perangkat daerah .....	55
BAB V.....	65
P E N U T U P .....	65

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja .....	10
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup .....	11
Tabel 2.3	Definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup .....	12
Tabel 2.4	Pengukuran Kinerja Per Sasaran. ....	13
Tabel 2.5	Pengukuran Kinerja Kegiatan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2020 .....	14
Tabel 2.6	Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2020 .....	24
Tabel 2.7	Hasil Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang .....	26
Tabel 2.8	Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2020 .....	29
Tabel 2.9	Konservasi Lahan Rawan Bencana Tahunn 2020 .....	30
Tabel 2.10	Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 2020 .....	30
Tabel 2.11	Daftar Desa Proklamasi 2020 .....	31
Tabel 2.12	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	32
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 .....	38
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 .....	40
Tabel 4.2	Usaha dan kegiatan yang diawasi secara aktif .....	52
Tabel 4.3	Prekiraan Maju Pendanaan Perangkat Daerah .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang. ... 9

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dilestarikan keberadaannya. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, prinsip yang harus dipegang adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dimana terdapat upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan yang seimbang dan lestari guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kabupaten Magelang, serta pagu indikatif dan perkiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek. Rencana jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun, rencana jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana jangka pendek untuk kurun waktu 1 tahun. Dokumen perencanaan harus terintegrasi dan mendukung pencapaian target pembangunan yang satu dengan lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Penyusunan rencana kerja perangkat daerah disusun berpedoman pada Rencana Strategis (renstra)

Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Rencana kerja berpedoman pada Rencana Strategi Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah. Rencana Kerja berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2022 disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2022 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, penyiapan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Untuk tahapan pertama penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 2020 sebagai materi konsultasi publik untuk mendapatkan masukan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renja DLH Kabupaten Magelang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Mgelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja DLH Tahun 2022 memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja DLH Tahun 2022 bertujuan mengakomodasi hasil evaluasi renja tahun 2019 dan 2020 (Berjalan). Hasil analisis kebutuhan 2020 yang tercantum pada dokumen ini sebagai bahan konsultasi publik dan acuan musrenbang dalam menentukan rencana kerja Tahun 2022.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2022 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang pengertian singkat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan pentingnya penyusunan dokumen tersebut yang terdiri dari:
  - a. Latar Belakang;
  - b. Landasan Hukum;
  - c. Maksud dan Tujuan; dan
  - d. Sistematika Penulisan.
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH kabupaten Magelang Tahun 2021 sampai dengan Triwulan 3, dan capaian prioritas dan target program Rencana Strategis DLH Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2020, serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan lingkungan hidup di kabupaten Magelang.
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan, sasaran, dalam Rencana Kerja DLH Kabupaten Magelang
4. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD
5. BAB V PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Rencana Kerja DLH Kabupaten Magelang Tahun 2022.

## **BAB II.**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja**

Fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator dalam pembangunan adalah sebagai lokomotif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun ruang lingkup kerjanya meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan hukum.

Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Urusan kehutanan saat renstra ini dibuat menjadi kewenangan Provinsi kecuali Taman hutan Raya (Tahura). Namun demikian, penyelenggaraan kegiatan pada wilayah terutama di sekitar hutan yang mempengaruhi kehidupan langsung masyarakat dapat berkolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan, Perhutani maupun Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kinerja bidang urusan yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah terutama pada urusan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah menetapkan seperangkat kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran perangkat daerah, dipertanggungjawabkan Kepala Dinas kepada Bupati. Keberhasilan kinerja IKU terkait langsung dari keberhasilan kinerja indikator program.

Tujuan rencana strategis DLH 2019-2024 adalah terwujudnya lingkungan hidup yang baik dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada akhir pelaksanaan renstra adalah 73,26. Untuk mewujudkan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik, perlu langkah tepat dan terpadu mulai perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada semua usaha dan/atau kegiatan, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan sanksi tegas. Sumber pencemar utama dan masif dari masyarakat yaitu sampah perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, renstra 2019 - 2024 memuat indikator sasaran perangkat daerah sekaligus sebagai indikator kinerja utama yaitu: Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim, Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, Persentase pengelolaan sampah, Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru.

Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim merupakan komposit indikator program antara lain: Persentase konservasi resapan air, persentase kawasan rawan longsor, persentase mata air yang

dikonservasi, persentase desa proklamasi dan persentase sekolah adiwiyata. Persentase RTH di wilayah perkotaan dihitung berdasar luas ruang terbuka hijau baik privat maupun publik di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan saat Rencana Kerja ini ditetapkan berdasar Peraturan kepala BPS No.10 Tahun 2010. Perhitungan dan target indikator persentase RTH di wilayah perkotaan sebaiknya direview ulang bila terdapat perubahan perda RTRW yang menetapkan secara jelas kawasan perkotaan. Persentase pengelolaan sampah dihitung berdasar perhitungan laporan capaian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Presentase usaha dan/atau kegiatan minimal berpredikat PROPER biru dengan dasar jumlah usaha yang berkategori taat baik yang diawasi oleh Kabupaten, Provinsi, maupun Kementerian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan perlu diawasi secara berkesinambungan. Target indikator kinerja utama tercantum pada tabel 2.1.

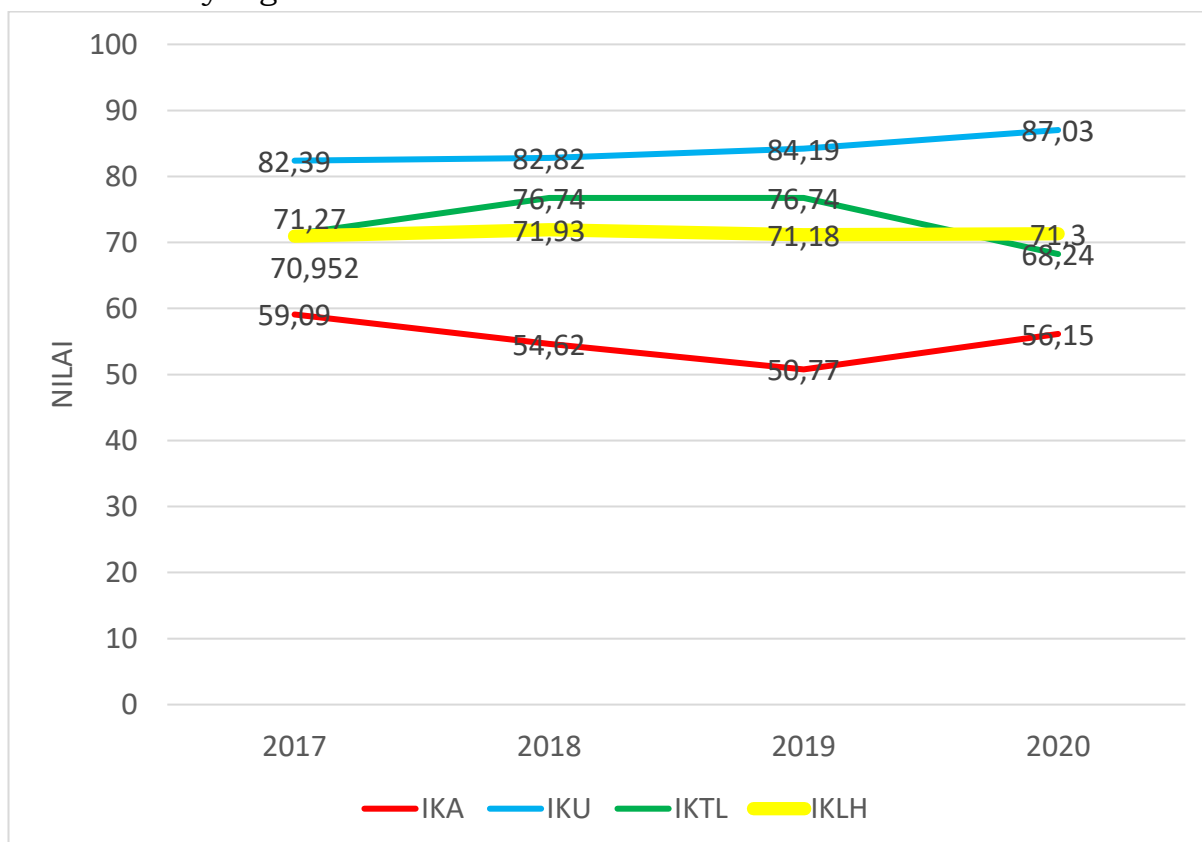
Indikator Presentase usaha dan/atau kegiatan minimal berpredikat PROPER biru, perlu dibuat norma dan Standar Operasional Prosedur jelas. Indikator tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Usaha/kegiatan yang dinyatakan taat/minimal berpredikat biru didasarkan dari hasil pengawasan dan pembinaan yang terstruktur, independent, dan akuntabel. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan tidak hanya berdasar rencana upaya pengelolaan lingkungan pada Andal dan UKL-UPL namun juga berdasar update peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa semua usaha/kegiatan serius melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan, setiap usaha/kegiatan yang telah diawasi dan dibina namun masih belum menunjukkan iktikad baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberi sanksi.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, perlu adanya sinergi antara penanggung jawab indikator penanganan sampah dan indikator pengurangan sampah. Perlu dibuat standar operasional yang jelas agar penghasil sampah benar-benar melaksanakan pengelolaan sampah secara benar. Dilaksanakan perbaikan mekanisme kerja sehingga diupayakan seoptimal mungkin penghasil sampah memilah sampahnya dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah ramah lingkungan *reduce, reuse, dan recycle*.

Pencapaian target indikator Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh peran serta aktif masyarakat. Perlu sosialisasi dan publikasi masif tentang ancaman bencana longsor, lahan kritis dan dampak perubahan iklim. Pendidikan usia dini melalui sekolah adiwiyata harus dilaksanakan berkelanjutan.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran, indikator program dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Capaian secara umum pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan

kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKLH berdasar Pembobotan antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL). Secara umum, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk kategori sedang. Namun demikian, perlu tetap waspada dan berusaha terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena efek negatif aktifitas perusakan dan pencemaran lingkungan hidup berlangsung dalam waktu yang lama.



Gambar 2.1 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang.

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan

prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif**. Semua indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup adalah indikator positif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

**Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.01 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Tabel 02.002 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1</b>	<b>IKLH</b>	<b>71,93 angka (0-100)</b>	<b>72,10 angka (0-100)</b>	<b>72,12 angka (0-100)</b>	<b>72,14 angka (0-100)</b>	<b>72,16 angka (0-100)</b>	<b>72,18 angka (0-100)</b>	<b>72,20 angka (0-100)</b>	<b>72,20 angka (0-100)</b>
1.1	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	5,52 angka (0-100)	5,94 angka (0-100)	7,53 angka (0-100)	8,97 angka (0-100)	10,34 angka (0-100)	11,67 angka (0-100)	12,98 angka (0-100)	12,98 angka (0-100)
1.2	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59 angka (0-100)	39,59 angka (0-100)	39,59 angka (0-100)	39,59 angka (0-100)	39,59 angka (0-100)	39,59 angka (0-100)	39,59 angka (0-100)	39,59 angka (0-100)
1.3	Persentase pengelolaan sampah	32,42 angka (0-100)	39,80 angka (0-100)	41,20 angka (0-100)	42,90 angka (0-100)	47,99 angka (0-100)	53,50 angka (0-100)	54,91 angka (0-100)	54,91 angka (0-100)
1.4	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	6 angka (0-100)	8 angka (0-100)	10 angka (0-100)	13 angka (0-100)	15 angka (0-100)	18 angka (0-100)	22 angka (0-100)	22 angka (0-100)

Tabel 02.3 Definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula
1	<b>IKLH</b>	<b>(IKAX30%)+(IKUX30%)+(IKTLX40%) (No. P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016)</b>
1.1	<i>Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim</i>	<i>(Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi + Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi + Persentase mata air yang dikonservasi + Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim + Persentase sekolah Adiwiyata)/5</i>
1.2	<i>Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan</i>	<i>(Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan+Persentase RTH Publik yang terkelola+Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan)/3</i>
1.3	<i>Persentase pengelolaan sampah</i>	<i>Neraca Jakstrada pengelolaan sampah</i>
1.4	<i>Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru</i>	<i>((Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking emas + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking hijau + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking biru)/Jumlah perusahaan peserta proper)*100%</i>



Tabel 2.004 Pengukuran Kinerja Per Sasaran.

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	35,49	41,2%	34,29%	<b>83,23%</b>	54,91%	62,45%
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%	39,59%	39,59%	<b>100,00%</b>	39,59%	100,00%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	5,52%	7,53%	8,94%	<b>118,73%</b>	12,98%	68,88%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	6%	10%	2%	<b>20,00%</b>	22%	9,09%
						<b>80,49%</b>		60,10%

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 80,49%. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Dari empat indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, terdapat satu indikator dikategorikan tercapai sangat tinggi, dua indikator tercapai kategori tinggi dan satu indikator kategori sangat rendah. Terhadap target akhir resntra, kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebesar 60,10%. Capaian kinerja indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru terhadap target renstra sebesar 9,09% (sangat rendah), perlu perhatian khusus untuk mencapai akhir target.

Tabel 02.005 Pengukuran Kinerja Kegiatan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2020

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	R		
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>397.914.025</b>	<b>177,82%</b>	<b>%</b>	<b>363.063.052</b>	<b>177,82%</b>	<b>91,24%</b>
Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola	6000	Surat	12.071.695	10338	Surat	12.010.615	172,30%	99,49%
	2. Jumlah arsip yang dikelola	4	Jenis Arsip		4	Jenis Arsip	-	100,00%	
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	17	Orang Hari	98.848.000	54	Orang Hari	90.196.636	317,65%	91,25%
	2. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	10	Rapat		26	Rapat	-	260,00%	
	3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	8	Orang Hari		11	Orang Hari	-	137,50%	
	4. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	2	Kali		11	Kali	-	550,00%	
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	Paket	-	0	Paket	-		
	2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0	Paket		0	Paket	-		
	3. Jumlah aset yang dikelola	0	Paket		0	Paket	-		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	21945	m <sup>2</sup>	144.903.200	21945	m <sup>2</sup>	136.581.175	100,00%	94,26%
	2. Jumlah rekening air, listrik, telepon dan surat kabar yang dibayar	120	rekening bulan		48	rekening bulan	-	40,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	14	Unit	140.007.130	11	Unit	122.190.615	78,57%	87,27%
	2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	0	Unit		0	Unit	-		
	3. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	8	Unit		8	Unit	-	100,00%	
	4. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	11	Unit		11	Unit	11	100,00%	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	Paket	-	0	Paket	-		
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Frekuensi pembinaan ASN	0	Kali	2.084.000	0	Kali	2.084.000		100,00%
	2. Jumlah ASN yang dibina	0	Orang		0	Orang	-		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	
		K		Rp	K		Rp	K	R
	4. Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	0	Orang		0	Orang	-		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>177,82%</b>	<b>91,24%</b>
<b>Predikat kinerja</b>								<b>ST</b>	<b>ST</b>
<b>Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>66.325.330</b>	<b>100,00%</b>	<b>%</b>	<b>65.726.180</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,10%</b>
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	13	Dokumen	53.654.000	13	Dokumen	53.055.305	100,00%	98,88%
	2. Jumlah Kegiatan Yang dikelola	32	Kegiatan		32	Kegiatan	-	100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	1	Dokumen	8.662.000	1	Dokumen	8.661.820	100,00%	100,00%
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	4	Dokumen	3.514.000	4	Dokumen	3.513.725	100,00%	99,99%
	2. Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun	12	Dokumen		12	Dokumen	-	100,00%	
	3. Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	12	Dokumen		12	Dokumen	-	100,00%	
	5. Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun	0	Dokumen		0	Dokumen	-		
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	1. Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	0	Dokumen	495.330	0	Dokumen	495.330		100,00%
	2. Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	0	Dokumen		0	Dokumen	-		
	3. Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun	1	Dokumen		1	Dokumen	-	100,00%	
	4. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	1	Dokumen		1	Dokumen	-	100,00%	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>100,00%</b>	<b>99,10%</b>
<b>Predikat kinerja</b>								<b>ST</b>	<b>ST</b>
<b>Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca</b>				<b>726.177.210</b>		<b>%</b>	<b>716.003.196</b>	<b>202,08%</b>	<b>98,60%</b>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	R		
	<b>1. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara</b>	<b>31</b>	%			<b>11</b>		<b>35,48%</b>	
	<b>2. Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*</b>	<b>53</b>	%			<b>100</b>	%	<b>188,68%</b>	
	<b>3. Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air</b>	<b>28</b>	%			<b>32</b>	%	<b>114,29%</b>	
	<b>4. Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi</b>	<b>18</b>	%			<b>18</b>	%	<b>100,00%</b>	
Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	1. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU	0	Usaha/Kegiatan	29.802.500	0	Usaha/Kegiatan	29.361.468		98,52%
	2. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	30	usaha/kegiatan		30	usaha/kegiatan	-	100,00%	
	3. Jumlah peserta sosialisasi	30	orang		30	orang	-	100,00%	
	4. Jumlah dokumen pengendalian kualitas udara yang dibuat	0	dokumen		0	dokumen	-		
	5. Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	0	lokasi		4	lokasi	-		
	6. Jumlah usaha/kegiatan yang dibina	0	usaha/kegiatan		0	usaha/kegiatan	-		
	8. Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*	1	Dokumen		1	Dokumen	-		
	Pengendalian Pencemaran Limbah B3	1. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	40	usaha/kegiatan	18.597.500	91	usaha/kegiatan	18.594.050	227,50%
2. Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan		4	Rekomendasi/ijin		12	Rekomendasi/ijin	-	300,00%	
3. Jumlah dokumen yang dibuat		0	dokumen		0	dokumen	-		
Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	1. Jumlah dokumen yang dibuat	0	dokumen	26.805.000	0	dokumen	26.365.418		98,36%
	2. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau	4	usaha/kegiatan		19	usaha/kegiatan	-	475,00%	
	3. Jumlah sungai yang diuji	13	Sungai		13	Sungai	-	100,00%	
	4. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	30	usaha/kegiatan		90	usaha/kegiatan	-	300,00%	
	5. Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan	1	rekomendasi/ijin		4	rekomendasi/ijin	-	400,00%	
	6. Jumlah embung/waduk yang diuji	0	Paket		0	Paket	-		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	R		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	1. Jumlah peserta sosialisasi	100	orang	13.073.000	200	orang	13.072.750	200,00%	100,00%
	2. Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk	0	kelompok		0	kelompok	-		
	3. Jumlah titik lokasi bersih kali	0	Sungai		0	Sungai	-		
	4. Jumlah sarpras pemeliharaan sungai	0	paket		0	paket	-		
	5. Jumlah sarpras PPA yang diadakan	0	paket		0	paket	-		
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	1. Jumlah Sampel yang diperiksa	100	Sampel	596.954.000	260	Sampel	587.732.570	260,00%	98,46%
	2. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dibeli	2	Paket		2	Paket	-		
	3. Jumlah Bahan Kimia/ Reagen yang dibeli	2	Paket		2	Paket	-		
	4. Jumlah Limbah yang dikelola	600	Kg		400	Kg	-	66,67%	
	5. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara	1	Paket		1	Paket	-	100,00%	
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	1. Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek	0	Pelatihan	40.945.210	0	Pelatihan	40.876.940		99,83%
	2. Jumlah Sistem yang dikelola	1	Paket		1	Paket	-	100,00%	
	3. Jumlah Parameter yang Terakreditasi	9	Parameter		9	Parameter	-	100,00%	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>202,08%</b>	<b>98,60%</b>
<b>Predikat kinerja</b>								<b>ST</b>	<b>ST</b>
<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup</b>				<b>85.204.910</b>			<b>83.364.422</b>	<b>71,80%</b>	<b>99,02%</b>
	<b>1. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan</b>	<b>60</b>	%		<b>109</b>				
	<b>2. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah</b>	<b>0</b>	%		<b>0</b>	%	-		
	<b>3. Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani</b>	<b>100</b>	%		<b>100</b>	%	-		
	<b>4. Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH</b>	<b>0</b>	%		<b>0</b>	%	-		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	R		
Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi	1437	Usaha dan/atau Kegiatan	58.003.000	922	Usaha dan/atau Kegiatan	56.507.012	64,16%	97,42%
	2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi	2	Usaha dan/atau Kegiatan		2	Usaha dan/atau Kegiatan	-	100,00%	
	3. Jumlah peserta sosialisasi	0	peserta		0	peserta	-		
	4. Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup	0	Peserta		0	Peserta	-		
	5. Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan	0	paket		0	paket	-		
	6. Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi	10	Usaha/Kegiatan		10	Usaha/Kegiatan	-	100,00%	
	8. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH	0	paket		0	paket	-		
	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	1. Jumlah dokumen IKLH	0	dokumen	1.164.805	0	dokumen	1.164.805	
2. Jumlah dokumen IKPLHD		0	dokumen		0	dokumen	-		
3. Jumlah dokumen laporan evaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup		0	dokumen		0	dokumen	-	0,00%	
4. Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup		0	Paket		0	Paket	-		
5. Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup		0	peserta		0	peserta	-		
6. Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		0	paket		0	paket	-		
7. Penyusunan RPPLH		0	Dokumen		0	Dokumen	-	0,00%	
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	1. Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	0	penghargaan	685.105	0	penghargaan	685.105		100,00%
	2. Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup	0	rancangan		0	rancangan	-		
	3. Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup	0	orang		0	orang	-		
	4. Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	0	orang		0	orang	-		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	R		
	5. Jumlah peserta sosialisasi adipura	0	orang	0	orang	-			
	6. Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura	0	kali	0	kali	-			
	7. Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat	0	peserta	0	peserta	-			
Penanganan Kasus dan Petaan Lingkungan Hidup.	1. Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	6	kasus	10	kasus	25.007.500	166,67%	98,64%	
	2. Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang di evaluasi	0	laporan	0	laporan	-			
	3. Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	0	surat	0	surat	-			
	4. Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan	0	orang	0	orang	-			
	5. Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan	0	titik	0	titik	-			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>							<b>71,80%</b>	<b>99,02%</b>	
<b>Predikat kinerja</b>							<b>S</b>	<b>ST</b>	
<b>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>				<b>10.799.791.450</b>		<b>%</b>	<b>8.695.737.414</b>	<b>132,14%</b>	<b>80,52%</b>
	<b>1. Persentase jumlah sampah yang tertangani*</b>	<b>20</b>	<b>%</b>		<b>17,32</b>			<b>86,60%</b>	
	<b>2. Persentase cakupan area pelayanan sampah</b>	<b>10</b>	<b>%</b>		<b>7,8</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>78,00%</b>	
	<b>3. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*</b>	<b>23</b>	<b>%</b>		<b>19,02</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>82,70%</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	2. Jumlah TPST yang dibangun	2	Paket	2.375.000.000	2	Paket	799.867.641	100,00%	
	3. Jumlah TPSS yang direvitalisasi/dibangun	0	Paket		0	Paket	-		
	8. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kelayakan yang disusun	0	Dokumen		0	Dokumen	-		
	9. Jumlah Alat Pengolah Sampah Yang dibeli	2	Paket		1	Paket	-	50,00%	
	11. Jumlah Lahan TPSS yang dibeli	0	Paket		0	Paket	-		
	13. Lahan TPS3R yang dibeli	0	Paket		0	Paket	-		
	14. Jumlah Alat GPS Kendaraan dan Kelengkapan instalasinya yang dibeli	0	Paket		0	Paket	-		
	1. Jumlah Alat yang dipelihara	97	Unit	7.899.069.000	97	Unit	7.387.288.442	100,00%	93,52%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	R		
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.	2. Jumlah kendaraan yang dikelola	38	Unit	38	Unit	-	100,00%		
	3. Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola	215	Orang	215	Orang	-	100,00%		
	4. Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras	0	Paket	0	Paket	-			
	5. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	0	Paket	0	Paket	-			
	7. Jumlah Laporan Penanganan Sampah	0	Dokumen	1	Dokumen	-			
Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	1. Jumlah Alat yang dipelihara	3	Unit	321.870.700	3	Unit	306.868.688	100,00%	95,34%
	2. Jumlah kendaraan yang dikelola	4	Unit		4	Unit	-	100,00%	
	3. Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola	10	Orang		10	Orang	-	100,00%	
	4. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	0	Paket		0	Paket	-		
	5. Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli	1	Paket		1	Paket	-	100,00%	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	1. Jumlah sosialisasi	8	Kali	203.851.750	16	Kali	201.712.643	200,00%	98,95%
	2. Jumlah Bank sampah Yang dibina	10	Unit		20	Unit	-	200,00%	
	3. Jumlah Lomba Bank Sampah yang dilaksanakan	1	Paket		2	Paket	-	200,00%	
	5. Jumlah bantuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah	0	Paket		0	Paket	-		
	7. Fasilitas Gerakan Pungut Sampah	1	Kali		2	Kali	-	200,00%	
	8. Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah	1	Unit		2	Unit	-	200,00%	
	9. Jumlah Laporan Pengurangan Sampah	0	Dokumen		0	Dokumen	-		
	11. Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat	0	Paket		0	Paket	-		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>132,14%</b>	<b>80,52%</b>
<b>Predikat kinerja</b>								<b>ST</b>	<b>T</b>
<b>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>				<b>2.277.307.000</b>			<b>2.212.773.152</b>	<b>175,00%</b>	<b>97,17%</b>



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	R		
	<b>1. Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan</b>	<b>1,88</b>	%		<b>1,88</b>	%	<b>100,00%</b>		
	<b>2. Persentase RTH Publik yang terkelola</b>	<b>25,86</b>	%		<b>25,69</b>	%	<b>99,34%</b>		
	<b>3. Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan</b>	<b>37,71</b>	%		<b>37,71</b>	%	<b>100,00%</b>		
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	1. Jumlah kendaraan yang dikelola	14	Unit	2.277.307.000	14	Unit	2.212.773.152	100,00%	97,17%
	2. Jumlah alat yang dikelola	53	Unit		53	Unit	-	100,00%	
	3. Jumlah kendaraan yang dibeli	0	Unit		0	Unit	-		
	5. Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola	53	Orang		53	Orang	-	100,00%	
	6. Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	1	Paket		2	Paket	-	200,00%	
	8. Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli	0	Paket		1	Paket	-		
	9. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	2169	Unit meter		4338	Unit	-	200,00%	
	10. Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli	1	Paket		2	Paket	-	200,00%	
	11. Penyusunan DED	1	Paket		3	Paket	-	300,00%	
	identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)	0	Paket		0	Paket	-		
	13. Pembangunan RTH	2	Paket		4	Paket	-	200,00%	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	2. Pendataan dan identifikasi sekolah	0	Paket	-	0	Paket	-		
	3. Penyusunan DED RTH sekolah sekolah	0	Paket		0	Paket	-		
	4. Pembangunan RTH sekolah	0	Paket		0	Paket	-		
	5. Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesaan	0	Paket		0	Paket	-		
	6. Sosialisasi RTH	0	Paket		0	Paket	-		
	<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>							<b>175,00%</b>	<b>97,17%</b>
<b>Predikat kinerja</b>							<b>ST</b>	<b>ST</b>	
<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim</b>				<b>747.099.930</b>		%	<b>744.919.302</b>	<b>114,01%</b>	<b>99,71%</b>
	<b>1. Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi</b>	<b>2,41</b>	%		<b>2,56</b>	%		<b>106,22%</b>	
	<b>2. Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi</b>	<b>0,59</b>	%		<b>0,78</b>	%		<b>132,20%</b>	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	R		
	<b>3. Persentase mata air yang dikonservasi</b>	<b>14</b>	%		<b>16,14</b>	%		<b>115,29%</b>	
	<b>4. Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim</b>	<b>4,57</b>	%		<b>5,65</b>	%		<b>123,63%</b>	
	<b>5. Persentase sekolah Adiwiyata</b>	<b>15,88</b>	%		<b>19,55</b>	%		<b>123,11%</b>	
Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	1. Jumlah Sekolah Adiwiyata yang di bina	100	sekolah	79.314.005	100	sekolah	78.125.014	100,00%	98,50%
	3. Jumlah fasilitasi saptas sekolah swasta Adiwiyata	0	paket		0	paket	-		
	4. Jumlah Peserta sosialisasi Sekolah Adiwiyata	0	orang		0	orang	-		
	5. Jumlah peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata	200	orang		200	orang	-	100,00%	
	6. Jumlah penerima penghargaan Kalpataru	0	orang/kelompok		0	orang/kelompok	-		
	7. Jumlah Pramuka saka kalpataru yang dibina	0	kelompok		0	kelompok	-		
	8. Jumlah Desa Proklamasi yang dibina	35	Desa		35	Desa	-	100,00%	
	9. Jumlah fasilitasi saptas Desa proklamasi	0	paket		0	paket	-		
	10. Jumlah peserta Bimtek Proklamasi	50	orang		50	orang	-	100,00%	
	11. Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan	0	Kali		0	Kali	-		
	Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.	1. Review dokumen kajian status kerusakan lahan	0	Dokumen	93.789.395	0	Dokumen	93.749.395	
2. Penghijauan untuk konservasi rawan bencana		0	Ha		0	Ha	-		
4. Jumlah peserta sosialisasi		0	orang		0	orang	-		
5. Jumlah Peserta Bimtek		0	orang		0	orang	-		
6. Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman		500	orang		500	orang	-	100,00%	
Konservasi Kawasan Resapan Air..	1. Jumlah alat biopori yang dibeli	1	paket	260.370.500	1	paket	259.468.888	100,00%	99,65%
	2. Jumlah sumur resapan yang dibuat	0	paket		0	paket	-		
	3. Jumlah dokumen kajian yang dibuat	1	dokumen		1	dokumen	-	100,00%	
	4. luas lahan yang dikonservasi	20	Ha		20,6	Ha	-	103,00%	
	5. jumlah orang yang disosialisai	200	orang		200	orang	-	100,00%	
	6. Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	15	kelompok		15	kelompok	-	100,00%	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)				
		K	Rp	K	Rp	K	R			
	8. Pembuatan senderan pengaman mata air	0	Paket			0	Paket	-		
	9. Jumlah pohon aren yang diselamatkan	0	Paket			0	Paket	-		
	10. Jumlah pohon yang ditanam dari Bank Pohon	1000	Pohon			1701	Pohon	-	170,10%	
Konervasi Keanekaragaman Hayati.	1. jumlah dokumen yang dibuat	0	dokumen	54.450.000		0	dokumen	54.450.000	100,00%	
	2. Jumlah tanaman langka yang ditanam	1	Paket			1	Paket	-	100,00%	
Koservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana (DBHCHT)	Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	30	Ha	259.176.030		62,7	Ha	259.126.005	209,00% 99,98%	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>									<b>114,01%</b>	<b>99,71%</b>
<b>Predikat kinerja</b>									<b>ST</b>	<b>ST</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>15.099.819.855</b>				<b>12.881.586.718</b>		
<b>TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)</b>									<b>126,48%</b>	<b>95,05%</b>
<b>PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)</b>									<b>ST</b>	<b>ST</b>

## 2.1 1. Indikator Persentase Pengelolaan Sampah

Target 2020 : 41%  
 Capaian 2020 : 34,29%

- Penyebab kegagalan: untuk RPJMD 2019-2024, perhitungan persentase pengelolaan sampah adalah mengacu Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2020 dianggarkan pembelian incinerator untuk menyasiasi kapasitas TPA Pasuruhan dan Klegen yang sudah kritis. Namun demikian ternyata pengadaan tersebut gagal.
- Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan dana desa untuk mengoptimalkan penanganan sampah.
- Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang per Desember 2020 adalah sejumlah 1.300.195 jiwa. Jumlah timbulan sampah harian Tahun 2020 adalah sebesar 650 Ton/Hari. Jumlah pengurangan pada tahun 2020 adalah sebesar 111 Ton/Hari atau 17,07%. Jumlah sampah yang tertangani sebesar 111.89 Ton/Hari atau 17,21%. Total pengelolaan sampah Tahun 2020 adalah sebesar 222,89 Ton/Hari atau 34,29%.

Capaian kinerja pengelolaan sampah sangat terpengaruh kondisi pandemi COVID-19. Banyak Bank sampah yang untuk sementara waktu tidak berani beroperasi sehingga sampah yang dikelola berkurang. Selain itu pertumbuhan Bank Sampah baru tidak memenuhi target. Terkait jumlah sampah yang ditangani juga memprihatinkan karena jumlah sampah masuk ke TPA Pasuruhan justru meningkat, namun demikian kapasitas TPA Pasuruhan sudah penuh.

Tabel 02.006 Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2020

NO	KETERANGAN	Target Tahun 2020		Realisasi Tahun 2020	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH TON/HARI		653		650
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH		138,56		111,00
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>		21,20%		17,07%
a	<b>Pembatasan timbulan sampah</b>		13,75		10,04
	Sekolah Adiwiyata	27	0,21	43	0,43
	Sekolah Non Adiwiyata (Tahap pembinaan Adiwiyata)	170	0,68	120	0,60
	GERAKAN SUMBER BERSIH	12	0,03	12	0,03
	LUBANG CERDAS ORGANIK (Biopori)				
	Pakan Ayam dan Ikan	641.367	12,83	448.957	8,98
b	<b>Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah</b>		100,06		95,91
	Bank Sampah Unit	720	2,18	692	1,88
	Bank Sampah Induk	3	0,03	2	0,01
	Pengumpulan di Lapak	37	92,90	37	92,90
	TPS3R (Anorganik) dikelola KSM	11	4,95	11	1,12
c	<b>Jumlah sampah didaur ulang di sumber</b>		24,75		5,05

NO	KETERANGAN	Target Tahun 2020		Realisasi Tahun 2020	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
	Bank Sampah Unit (Kompos) Kowenisasi dan Biopori tahun 2020	720	15,84	692	1,50
	Bank Sampah Induk (Kompos)	3	0,09	2	0,06
	TPS3R (Kompos) dikelola KSM	11	4,95	11	0,36
	PDU dikelola KSM	0	0,00	0	0,00
	Rumah kompos dikelola KSM	0	0,00	0	0,00
	Sekolah Adiwiyata (kompos)	27	0,27	43	0,43
	Pengelola sampah kawasan	3	3,60	3	2,70
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH		130,70		111,89
	<i>Persentase penanganan sistem kota</i>		20,00%		17,21%
f	<b>Pengolahan</b>		47,00		27,28
	<b>1. Sampah terolah menjadi bahan baku</b>		47,00		27,28
	TPS3R dikelola sistem kota	2	1,50	2	0,15
	TPSS dikelola sistem kota	9	18,00	45	1,28
	Rumah Kompos dikelola sistem kota			0	0,00
	Lubang cerdas skala kota (koven sapuan jalan)	60	1,50	0	0,00
	USAHA DAUR ULANG PAPERTECH DLL	3	26,00	3	26,00
	<b>2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi</b>				
g	<b>Pemrosesan TPST</b>		83,70		84,61
	Sampah yang ditimbun controled landfill	1	69,00	1	69,91
	- Recovery plastik oleh pemulung	1	8,70	1	8,70
	- Kompos	1	6,00	1	6,00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)		269,26		222,89
	<i>Persentase sampah terkelola</i>		41,20%		34,29%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)		384		427
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>		58,79%		65,71%

## 2.1 2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan

Target 2020 : 39,59%

Capaian 2020 : 39,59%

- Penyebab keberhasilan: saat ini perhitungan luas Ruang Terbuka Hijau adalah berdasarkan luas administratif Desa dan Kelurahan perkotaan. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Magelang didominasi oleh Ruang Terbuka Hijau privat.
- Alternatif solusi yang dilakukan: mendorong meningkatnya ruang terbuka hijau yang bisa diakses publik.
- Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dilaksanakan juga kajian calon hutan kota berkerjasama dengan pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tabel 02.007 Hasil Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																								Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	<b>Salaman</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,17</b>	<b>0,81</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>180,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,07</b>	<b>478,61</b>	<b>38,46%</b>	<b>1,15%</b>
	Sidomulyo	0	0	0	0,18	0,28	0	0	0	0	0	0	0	1,30	0,81	0	0,07	127,25	0	0	0	0	0	0	129,89	306,74	42,35%	0,81%
	Salaman	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,87	0	0	0	53,30	0	0	0	0	0	0	54,18	171,87	31,53%	0,34%
2	<b>Borobudur</b>	<b>0</b>	<b>3,81</b>	<b>19,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,93</b>	<b>3,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,35</b>	<b>472,11</b>	<b>24,64%</b>	<b>0,72%</b>
	Borobudur	0	3,81	19,48	0	0	0	0	0	1,23	0	0	0	0,93	3,29	0	0	85,06	0	0	2,55	0	0	0	116,35	472,11	24,64%	0,72%
3	<b>Ngluwar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147,84</b>	<b>308,55</b>	<b>47,91%</b>	<b>0,92%</b>
	Ngluwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	146,93	0	0	0	0	0	0	147,84	308,55	47,91%	0,92%
4	<b>Salam</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,41</b>	<b>0,79</b>	<b>1,15</b>	<b>0</b>	<b>633,99</b>	<b>0</b>	<b>0,19</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732,42</b>	<b>1.779,94</b>	<b>41,15%</b>	<b>4,56%</b>
	Gulon	0,15	0	0	0	0	0	0	0	6,09	0	0	0	0,42	0,40	0,11	0	209,21	0	0,19	0,0018	0	0	0	216,58	440,13	49,21%	1,35%
	Jumoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	82,51	0	0	0	5,88	0,39	1,04	0	167,98	0	0	0	0	0	0	257,80	568,89	45,32%	1,60%
	Sucen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0	0	0	129,66	0	0	0,09	0	0	0	130,36	405,99	32,11%	0,81%
	Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0	0	127,13	0	0	0,06	0	0	0	127,69	364,94	34,99%	0,79%
5	<b>Dukun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387,86</b>	<b>619,66</b>	<b>62,59%</b>	<b>2,41%</b>
	Banyubiru	0	0	0	0	0	0	0	0	5,83	0	0	0	0,77	0	0	0	192,02	0	0	0	0	0	0	198,62	303,76	65,39%	1,24%
	Banyudono	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,74	0	0	0	188,50	0	0	0	0	0	0	189,24	315,90	59,90%	1,18%
6	<b>Muntilan</b>	<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,51</b>	<b>5,77</b>	<b>0,86</b>	<b>0</b>	<b>593,44</b>	<b>0</b>	<b>0,35</b>	<b>0,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613,56</b>	<b>1.503,00</b>	<b>40,82%</b>	<b>3,82%</b>
	Tanjung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,40	0	0	34,41	0	0	0	0	0	0	34,95	92,80	37,66%	0,22%
	Keji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	119,60	0	0,03	0	0	0	0	119,68	251,77	47,54%	0,74%
	Gunungpring	0	0	0	0	0	0	8,05	0	0	0	0	0	1,64	1,13	0	0	40,57	0	0	0,06	0	0	0	51,44	247,47	20,79%	0,32%
	Pucungrejo	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0,04	0	61,21	0	0,03	0,02	0	0	0	61,79	153,09	40,36%	0,38%
	Tamanagung	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2,04	0	0	129,11	0	0,23	0,06	0	0	0	132,69	328,20	40,43%	0,83%
	Sedayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,96	0,47	0,11	0	125,35	0	0	0	0	0	0	126,90	213,21	59,52%	0,79%
	Muntilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,78	1,26	0,66	0	83,19	0	0,06	0,16	0	0	0	86,11	216,46	39,78%	0,54%

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																								Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7	<b>Mungkid</b>	<b>0,19</b>	<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,87</b>	<b>5,06</b>	<b>0,38</b>	<b>0,13</b>	<b>994,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002,74</b>	<b>1.905,40</b>	<b>52,63%</b>	<b>6,24%</b>
	Pabelan	0	0,29	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,32	0	0,13	220,58	0	0	0,01	0	0	0	221,63	386,89	57,29%	1,38%
	Paremono	0	0	0	0,03	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0	0	289,09	0	0	0	0	0	0	290,03	425,08	68,23%	1,80%
	Blondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0,96	0	0	33,06	0	0	0,06	0	0	0	34,54	182,65	18,91%	0,21%
	Mungkid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,53	0,62	0	0	84,18	0	0	0,02	0	0	0	85,35	206,94	41,24%	0,53%
	Bojong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,19	0	0	252,66	0	0	0	0	0	0	252,92	366,44	69,02%	1,57%
	Mendut	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0,14	0	0	80,73	0	0	0,06	0	0	0	81,24	196,35	41,38%	0,51%
	Sawitan	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0,48	2,00	0,38	0	33,94	0	0	0,16	0	0	0	37,03	141,04	26,25%	0,23%
8	<b>Mertoyudan</b>	<b>0,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,26</b>	<b>10,27</b>	<b>1,62</b>	<b>0</b>	<b>886,48</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940,78</b>	<b>3.349,73</b>	<b>28,09%</b>	<b>5,85%</b>
	Kalinegoro	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,99	0,27	0,12	0	62,80	0	0	0	0	0	0	65,23	392,91	16,60%	0,41%
	Jogonegoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22	1,99	0	0	115,34	0	0	0	0	0	0	117,55	295,99	39,72%	0,73%
	Sukorejo	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76	0,92	0	0	117,50	0	0,08	0	0	0	0	119,50	427,35	27,96%	0,74%
	Danurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,95	0,11	0	88,87	0	0	0	0	0	0	89,93	347,50	25,88%	0,56%
	Sumberrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,70	0,24	0	120,56	0	0	0,02	0	0	0	121,79	320,19	38,04%	0,76%
	Mertoyudan	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,52	1,72	0	0	179,99	0	0	0,04	0	0	0	182,32	529,05	34,46%	1,13%
	Banyurojo	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0,20	2,90	1,14	0	67,36	0	0	0,02	0	0	0	94,64	422,20	22,42%	0,59%
	Banjarnegoro	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,82	0	0	97,11	0	0	0	0	0	0	98,33	316,93	31,03%	0,61%
	Bulurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0,95	0	0	0	36,95	0	0,14	0	0	0	0	51,49	297,61	17,30%	0,32%
9	<b>Tempuran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,97</b>	<b>4,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,91</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416,55</b>	<b>1.420,04</b>	<b>29,33%</b>	<b>2,59%</b>
	Sidoagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,27	1,99	0	0	82,94	0	0	0	0	0	0	88,20	505,18	17,46%	0,55%
	Tanggulrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	27,79	0	0	0	0,34	0,93	0	0	98,17	0	0	0	0	0	0	127,23	369,02	34,48%	0,79%
	Girirejo	0	0	0	0	0	0	0	0	16,23	0	0	0	1,12	0,43	0	0	43,17	0	0	0	0	0	0	60,96	177,82	34,28%	0,38%
	Tempurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	0,83	0	0	136,63	0	0,46	0	0	0	0	140,18	368,03	38,09%	0,87%
10	<b>Kaliangkrik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,03</b>	<b>0,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,94</b>	<b>228,97</b>	<b>57,19%</b>	<b>0,81%</b>
	Beseran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	60,66	0	0	0	0	0	0	61,56	108,88	56,54%	0,38%
	Giriwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,09	0	0	69,16	0	0	0	0	0	0	69,38	120,09	57,77%	0,43%

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																								Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
11	<b>Bandongan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,39	1,55	0,32	0	573,24	0	0,05	0	0	0	0	576,54	958,41	60,16%	3,59%	
	Trasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,84	0	0	175,90	0	0	0	0	0	0	176,87	318,25	55,58%	1,10%	
	Bandongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,70	0,29	0	171,76	0	0,05	0	0	0	0	173,55	299,73	57,90%	1,08%	
	Sidorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0,03	0	225,58	0		0	0	0	226,12	340,43	66,42%	1,41%	
12	<b>Secang</b>	0,37	0	0	0,06	0,20	0	0	0	1,06	0	0	0	8,57	5,85	0	0	776,79	0	0,04	0,16	0	0	0	793,11	1.757,55	45,13%	4,94%	
	Jambewangi	0,03	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,56	0	0	75,63	0	0	0,04	0	0	0	76,36	282,10	27,07%	0,48%	
	Pucang	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36	0,62	0	0	60,60	0	0	0	0	0	61,65	130,86	47,11%	0,38%	
	Madusari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,99	0,57	0	0	195,74	0	0	0	0	0	198,29	341,03	58,15%	1,23%	
	Payaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,08	0,97	0	0	141,50	0	0,04	0	0	0	144,58	278,02	52,00%	0,90%	
	Secang	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2,56	2,51	0	0	186,87	0	0	0,11	0	0	0	192,15	374,07	51,37%	1,20%
	Krincing	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1,06	0	0	0	1,58	0,63	0	0	116,46	0	0	0,02	0	0	0	120,09	351,47	34,17%	0,75%
13	<b>Tegalrejo</b>	0,12	0,37	0	0,02	0,63	0	0	0	0	0	0	0	1,15	3,00	0,23	0	157,99	0	0,24	0,11	0	0	0	163,88	776,46	21,11%	1,02%	
	Banyuurip	0,12	0,26	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0,85	0	0	20,08	0	0,19	0,10	0	0	0	22,14	116,94	18,93%	0,14%	
	Purwosari	0	0	0	0	0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0	4,93	0	0,01	0	0	0	0	5,55	92,84	5,98%	0,03%	
	Tegalrejo	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,44	1,76	0,04	0	32,49	0	0	0,02	0	0	0	34,94	293,32	11,91%	0,22%
	Ngasem	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,30	0	0	25,27	0	0,02	0	0	0	0	25,81	95,53	27,02%	0,16%
	Girirejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,09	0,02	0	75,23	0	0,03	0	0	0	0	75,44	177,84	42,42%	0,47%
14	<b>Pakis</b>	0	0	0	0	0,03	0	0	0	1,01	0	0	0	0	0	0	0	2,88	0	0	0	0	0	0	3,92	95,85	4,09%	0,02%	
	Rejosari	0	0	0	0	0,03	0	0	0	1,01	0	0	0	0	0	0	0	2,88	0	0	0	0	0	0	3,92	95,85	4,09%	0,02%	
15	<b>Grabag</b>	0	0	0	0,18	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0,72	2,14	0	0	148,63	0	0	0,02	0	0	0	151,83	414,81	36,60%	0,94%	
	Grabag	0	0	0	0,18	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,72	2,14	0	0	148,63	0	0	0,02	0	0	0	151,83	414,81	36,60%	0,94%
<b>Total Kawasan Perkotaan</b>																								<b>6.362,40</b>	<b>16.069,09</b>	<b>39,59%</b>			

Data inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis data Inventarisasi RTH Tahun 2018.



### 2.1 3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim

Target 2020 : 7,53%

Capaian 2020 : 8,94%

- a. Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air. Sudah dilaksanakan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan sekolah adiwiyata, serta makin populernya program kampung iklim.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan memacu sekolah adiwiyata menuju sekolah adiwiyata mandiri. Selain itu memacu Desa Proklim menjadi Proklim lestari.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pelatihan dan gerakan penanaman.

Pada 2020, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan konservasi kawasan resapan air di 5 Desa. Luas daerah resapan air yang dikonservasi sebesar 26,8 Ha. Dari 26,8 Ha yang dikonservasi tersebut, terdapat 9 mata air yang dikonservasi secara vegetatif. Konservasi secara sipil teknis melalui pembuatan senderan tidak jadi dilaksanakan. Komulatif jumlah kawasan resapan air yang sudah dikonservasi sebesar 437,89 Ha dari 17.075,67 Ha luas kawasan resapan air. Total Mata 36 air yang di konservasi sampai dengan 2020 dari 223 Mata Air target terdaftar pada renstra 2019-2024.

Tabel 2.8 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2020

DESA	KECAMATAN	JENIS BIBIT	JUMLAH (BATANG)	Luas (Ha)	Mata Air
Jamus Kauman	Ngluwar	Durian	88	0,43	Tuk Tirto, Tuk Klewer
		Manggis	100	0,49	
		Alpoket	200	0,98	
		Tengsek	50	0,25	
Gandusari	Bandongan	Aren	727	3,56	Tuk Gending, MA Jogonegoro
		Durian	134	0,66	
		Tengsek	50	0,25	
Ngargoretno	Salaman	Kopi Sambung	3.035	14,87	Beji, Bendo
		Tengsek	50	0,25	
Blondo	Mungkid	Durian	90	0,44	Sendang Lor, sendang Kidul
		Mangga	90	0,44	
		Kelengkeng	120	0,59	
		Mahoni	242	1,19	
		Tabebuya	20	0,10	
		Tengsek	50	0,25	
Tanggulrejo	Tempuran	Durian	184	0,90	Kali Golek 1, Kali Golek 2
		Kelengkeng	190	0,93	
		Tengsek	50	0,25	
Jumlah				26,80	9 Mata Air

Pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan konservasi lahan bencana dari sumber dana DBHCHT sebesar 38,35 Ha. Konservasi dilaksanakan di lahan rawan bencana di wilayah penghasil tembakau (Tabel 3.6). Total lahan rawan bencana yang dikonservasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 527,49 Ha.

Tabel 02.09 Konservasi Lahan Rawan Bencana Tahunn 2020

No	Nama Desa	Nama Bibit	Jumlah Bibit	Luas Lahan (ha)
1	Desa Tanjungsari Kecamatan Windusari	Alpukat	661	1,65
		Kopi Arabika	14.508	14,50
2	Desa Kalijoso Kecamatan Windusari	Kopi Arabika	22.200	22,20
Total			37.369	38,35

Hasil pembinaan terhadap 110 sekolah sampai dengan tahun 2020, terdapat 21 sekolah adiwiyata baru. Total sekolah adiwiyata sampai dengan 2020 sebanyak 43 sekolah. Hasil pembinaan terhadap 21 Desa pada Tahun 2020 sudah teregistrasi 7 Desa Proklamasi. Total desa Proklamasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 21 Desa.

Tabel 2.10 Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 2020

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SD N Gunungpring 1	Muntilan
2	SD N Gunungpring 2	Muntilan
3	SD N Gunungpring 3	Muntilan
4	SD N Gunungpring 4	Muntilan
5	SD N Muntilan	Muntilan
6	SD N Menayu 1	Muntilan
7	SD Muhammadiyah Tamanagung	Muntilan
8	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	Muntilan
9	SD N Grabag 1	Grabag
10	SD N Tampingan 1	Tegalrejo
11	SD N Girirejo 3	Ngablak
12	SD N Salaman 2	Salaman
13	SD N Sengi 2	Dukun
14	MIN 1 Magelang	Mertoyudan
15	MIN 3 Magelang	Secang
16	MIN 7 Magelang	Tempuran
17	SMP N 1 Tegalrejo	Tegalrejo
18	SMP N 1 Mungkid	Mungkid

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
19	SMP N 1 Pakis	Pakis
20	SMP N 2 Pakis	Pakis
21	SMP N 1 Ngablak	Ngablak

Tabel 02.011 Daftar Desa Proklamasi 2020

No	Nama Desa	Nilai	Ket			
				Data Umum	Rencana Aksi	Sumber daya
1	Desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo	96,73	SRN	approved	approved	approved
2	Desa Margoyoso Kecamatan Salaman	95,76	SRN	approved	approved	approved
3	Desa Paten Kecamatan Srumbung	95,00	SRN	approved	approved	approved
4	Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman	91,87	SRN	approved	approved	approved
5	Desa Tirto Kecamatan Grabag	70,31	SRN	approved	approved	approved
6	Dusun Ngapon Desa Ketangi Kec. Kaliangkrik	60,37	SRN	approved	approved	approved
7	Desa Krincing Kecamatan Secang	52,74	SRN	approved	approved	approved

#### 2.1 4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru

Target 2020 : 10%

Capaian 2020 : 2%

- Penyebab kegagalan: adanya pandemi COVID 19 menyebabkan pelaku usaha dan kegiatan kesulitan keuangan dan mempengaruhi pemenuhan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan usaha oleh pihak DLH Kabupaten Magelang juga terhambat oleh adanya pandemi.
- Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
- Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan pengawasan izin, pembinaan izin dan pelaksanaan program PROPER.

Pada Tahun 2020 terdapat 3 usaha yang mengikuti program pemeringkatan perusahaan (PROPER) Nasional. Perusahaan tersebut adalah PT. New Armada Karoseri, PT Lembah Tidar Jaya dan PT. PAPERTECH Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020, ketiga perusahaan di wilayah Kabupaten Magelang yang mengikuti program PROPER Nasional dikategorikan peringkat **MERAH**. Selain PROPER Nasional, terdapat 4 usaha yang mengikuti program proper daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu PT. DJOHARTEX, PT. USMANTEX, PT. PANDATEX, dan CV. KURNIA KULIT. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/67 Tahun 2020 tentang Penerima Penghargaan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, PT Panca Persada Mulia (PT.PANDATEX) dinyatakan berkategori TAAT (Peringkat Biru).

Tabel 02.012 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	83,63%	80,52%	Tidak ada efisiensi
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	<b>100,00%</b>	97,17%	2,83%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	<b>118,73%</b>	99,71%	0,29%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	20,00%	98,52%	Tidak ada efisiensi
<b>Rata-rata tingkat efisiensi :</b>					<b>0,78%</b>

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terdapat efisiensi 0,78%. Pelaksanaan indikator Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan sebesar 2,83%. Indikator lainnya relatif tidak ada efisiensi.

## 2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Beberapa hal isu strategis yang perlu diwaspadai adalah adanya target Kebijakan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Persampahan. DLH Kabupaten Magelang harus segera membuat persiapan menyesuaikan perubahan target pengelolaan sampah. Saat ini Kondisi TPA Pasuruan dalam kondisi sudah melebihi kapasitas daya tampung sampah. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan penguatan program dan kegiatan di bidang penanganan maupun pengurangan sampah.

Kebijakan nasional lain yang perlu untuk disikapi adalah tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang juga telah menjadi indikator tujuan Renstra. Perlu untuk fokus pada program dan kegiatan pencegahan pencemaran air karena Indeks Kualitas Air kita masih rendah. Laboratorium perlu difasilitasi dengan alat

pemantauan kualitas udara untuk mengukur indeks kualitas udara kita secara standar.

Kabupaten Magelang harus terus aktif mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim. Program dan Kegiatan DLH juga dalam rangka mengurangi timbulan emisi gas rumah kaca. Antisipasi dampak perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui program Adipura, ProKlim dan Adiwiyata.

Kejadian bencana non alam berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali ditemukan kasusnya di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Pandemi ini kemudian meluas ke berbagai negara sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan global hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat di penjuru dunia. Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pembina pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) perlu untuk mengantisipasi adanya limbah B3 dari pandemic Covid-19. Pembinaan dan pemantauan terhadap Fasilitas Layanan Kesehatan perlu ditingkatkan. Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan dapat memfasilitasi penanganan limbah Covid -19 pada fasilitas isolasi mandiri.

Teknologi informasi pada era globalisasi, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung interaksi masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Perubahan tatatan sosial dan ekonomi memaksa masyarakat untuk bertransformasi dan membiasakan diri dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bahkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu strategi untuk dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Menyikapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, perlu diantisipasi dengan mempersiapkan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi secara bijaksana dan mentransformasikannya menjadi kegiatan yang positif dan bermanfaat. Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilaksanakannya pembatasan pergerakan manusia, maka penerapan teknologi informasi menjadi salah satu solusi. Teknologi informasi dapat memberikan kemudahan, efisiensi waktu, biaya serta tenaga. Namun demikian hal ini mengandung konsekuensi bahwa tanpa disadari masyarakat sudah mengalami ketergantungan terhadap teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, manajemen pengelolaan data, dan kemudahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup perlu untuk membuat Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Sistem yang dibangun hendaknya berbasis daring dan geospasial. Program dan kegiatan sistem informasi lingkungan juga merupakan pendukung kebijakan smart city.

### **BAB III.**

## **TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Pokok-pokok Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang meliputi arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pokok-pokok kebijakan pemerintah melalui program 100-0-100 dan milenium development goals yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
  - a. Perlu peningkatan kualitas informasi tentang konsep dan rujukan Pembangunan yang berkelanjutan.
  - b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, disamping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan tentang pembangunan yang berkelanjutan.
2. Arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan
  - a. Peningkatan pemahaman tentang konsep berwawasan lingkungan
  - b. Perlunya sosialisasi kepada pelaku usaha tambang dan industri tentang pentingnya industri yang berwawasan lingkungan.

Adapun kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan penataan dan penataan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Peningkatan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Peningkatan sarana/prasarana dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Peningkatan kerjasama antar lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah domestik;
5. Mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan serta pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah dan antar sektor;
8. Meningkatkan kualitas data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah. Dampak perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor, dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan implementasi konsep pembangunan rendah karbon yang mempertimbangkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini selaras dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), dimana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut, dan pemeliharaan ekosistem darat.

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa Tengah disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Hal tersebut diperparah juga dengan peningkatan pencemaran limbah industri yang disebabkan karena belum optimalnya penanganan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, baik dari cakupan wilayah, pengadaan lahan, biaya operasional, pemeliharaan, dan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha (masyarakat/industri) dalam pengelolaan limbah.

Masih maraknya kegiatan pertambangan yang belum menerapkan good mining practice berpotensi dapat merusak lahan, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait perizinan dan pembinaan/pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur.

Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih rendah antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air.

Persoalan sumberdaya daya alam yang juga tidak kalah penting adalah kerusakan sumber daya pesisir. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya abrasi dan sedimentasi akibat rusaknya ekosistem mangrove, konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir, dan konflik sosial terkait alih fungsi lahan.

Dikaitkan dengan isu kebencanaan kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan wilayah melalui pembentukan pusat pertumbuhan baru dan implementasi proyek strategis nasional perlu didukung dengan upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat bencana terhadap hasil-hasil pembangunan serta untuk menghindari potensi hambatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH) mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih

tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua stakeholder pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Tujuan dan sasaran daerah mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi DLH diuraikan melalui misi kedua. Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Capaian Pembangunan Wilayah Berkelanjutan (CPWB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), *gini ratio*, dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:

- a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH;
- b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator indeks pembangunan wilayah;
- c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam



renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah **“tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH”**. Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup periode renstra 2019 - 2024 adalah **“Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan”**, Dengan indikator:

1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim
2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan
3. Persentase pengelolaan sampah
4. Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.01 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

**Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah”**

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Target capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	6	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah			Capaian Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	%	NA	NA	71,91	74,76	82,21	82,21
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		IKLH	angka (0-100)	71,30	71,32	71,34	71,36	71,38	71,38
		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan		Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	%	NA	NA	40,25	40,70	41,15	41,15
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	angka (0-100)	41,47	42	45	50	55	55
				Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	NA	4,65	6,98	9,30	11,63	11,63

## BAB IV.

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

#### 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program kerja yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi Dinas Lingkungan Hidup. Agar fokus dan mudah dalam penilaian kinerja, satu program diharapkan hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja setingkat eselon III. Bila lebih dari satu unit kerja, indikator program lebih dari satu dan diharapkan jelas unit kerja penanggungjawabnya. Program kerja dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyelesaikan akar masalah. Satu kegiatan diampu oleh hanya satu unit kerja setingkat eselon IV. Kegiatan kerja menyokong tercapainya sasaran dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Selain yang bersumber dari APBD, direncanakan beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus. Selain dana pemerintah, kegiatan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, Desa dan Lembaga Pendidikan. Bentuk lain pelaksanaan kerjasama kegiatan adalah dengan adanya sumbangan dan hibah seperti program Bank Pohon. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup beserta indikasi dana dan kinerjanya sesuai dengan tabel 4.1.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip *money follow program* sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang kabinet, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma *money follow function* menjadi *money follow program*. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep “*money follow function*” selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya, program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait. Penyusunan Rencana Kerja ini sudah disinkronkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategi 2019-2024 dan Penyusunan Draft Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi unsur di Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.01 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									<b>25.789.119.101</b>			
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								<b>9.079.068.101</b>			
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>14.000.000</b>			
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	1 dokumen	45 angka 1-100	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	4 dokumen	45 angka 1-100	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	12 dokumen										
			Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun	8 dokumen										
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	1 dokumen	45 angka 1-100	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen										
			Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	1 dokumen										
			Jumlah dokumen SP yang tersusun	1 dokumen										
			Jumlah SOP yang tersusun	1 dokumen										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>8.557.040.000</b>				
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	45 angka 1-100	8.472.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	14 dokumen	45 angka 1-100	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>5.000.000</b>				
2	11	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	105 orang 8 orang	45 angka 1-100	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>90.196.636</b>				
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 kali 156 orang hari 115 orang hari 19 rapat	45 angka 1-100	90.196.636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>83.200.000</b>	
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah surat yang dikelola	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6000 surat	45 angka 1-100	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	192 rekening	45 angka 1-100	73.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>329.631.465</b>	
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	14 unit	45 angka 1-100	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			8 unit							
2	11	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah mebeleur/perengkapan yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	1 paket	45 angka 1-100	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah alat/mesin yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 unit	45 angka 1-100	9.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	11	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Luas gedung kantor yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24000 M2	45 angka 1-100	118.141.465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>225.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>							<b>130.000.000</b>		
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Penetapan RPPLH	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	6,98%	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun (IKPLHD dan IKLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	6,98%	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>							<b>95.000.000</b>		
2	11	2	2.02	1		Persentase ketersediaan	Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	Persentase ketaatan penanggung jawab	Kab. Magelang,	100 %	1 dokumen	6,98%	95.000.000	Dana Transfer

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen KLHS RDTR yang tersusun	usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen			Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>								<b>404.000.000</b>	
2	11	3	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>								<b>241.000.000</b>	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen kualitas air yang dibuat Jumlah dokumen kualitas udara yang dibuat Jumlah rekomendasi/ijin/pertek air limbah dan/atau emisi yang dikeluarkan Jumlah usaha/kegiatan pencemar yang dibina Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,71%	1 dokumen 0 dokumen 1 rekomendasi 5 usaha/kegiatan 25 usaha/kegiatan	6,98%	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,71%	0 usaha/kegiatan 1 dokumen	6,98%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian pencemaran dan	Jumlah Bahan Kimia/ Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	33,71%	1 paket 1 paket	6,98%	166.000.000	Dana Transfer Umum-Dana



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					kerusakan lingkungan hidup	Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi	izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			1 paket			Alokasi Umum	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>							<b>160.000.000</b>		
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Bimtek/pelatihan Jumlah Parameter yang Terakreditasi Jumlah Sistem yang dikelola	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,71%	0 pelatihan 11 parameter 1 paket	6,98%	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>							<b>3.000.000</b>		
2	11	3	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kajian pengendalian pencemaran air Jumlah sarpras PPA yang diadakan Jumlah verifikasi hibah/bansos yang dilaksanakan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,71%	0 paket 0 paket 3 kelompok	6,98%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>							<b>4.347.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>							<b>4.347.000.000</b>		
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Publik yang terkelola	Jumlah bahan konstruksi pengelola RTH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan	Kab. Magelang, Semua	25,75 %	1 paket	40,25%	3.825.000.000	Dana Transfer Umum-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
							Jumlah bahan kontruksi pengelola RTH yang di beli	Mitigasi Dampak Perubahan Iklim*	Kecamatan, Semua Kelurahan		0 paket				Dana Alokasi Umum	
							Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH				1 paket					
							Jumlah bibit tanaman yang di beli				1 paket					
							jumlah mechanical elektrical yang di beli				2169 meter					
							Jumlah pengelola RTH Publik yang di kelola				54 orang					
							Pembangunan RTH				1 paket					
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH Publik yang terkelola	Jumlah alat yang di beli	Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim*	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,75 %	1 paket	40,25%	522.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Jumlah alat yang di kelola				53 unit					
							Jumlah kendaraan yang di beli				1 paket					
							Jumlah kendaraan yang di kelola				12 unit					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>							<b>440.000.000</b>				
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>							<b>40.000.000</b>				
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 usaha/kegiatan	6,98%	40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Persentase pelaporan pengelolaan limbah B3				10 %					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>400.000.000</b>				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan	Pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah B3 medis Jumlah kerjasama dengan pengelola limbah B3	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket 1 kerjasama	6,98%	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>							<b>60.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>60.000.000</b>		
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	jumlah sosialisasi Persentase fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 usaha/kegiatan 100%	6,98%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi dokumen lingkungan Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 usaha / kegiatan 100%	6,98%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>							<b>103.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>							<b>40.000.000</b>		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Cakupan konservasi jogo tuk	Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,39 %	1 dokumen	40,25 %	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2.02</b>		<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>							<b>63.000.000</b>		
2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Cakupan konservasi jogo tuk	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,39 %	10 komunitas	40,25 %	63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah orang yang dilatih				40 kali			
							Jumlah orang yang disosialisasi				0 kali			
							Jumlah pohon yang ditanam dari bank pohon				1000 Paket			
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>							<b>75.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>75.000.000</b>		
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Bintek adiwiyata	Cakupan Konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,85 %	0 kali	40,25 %	71.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Bintek proklam				0 kali			
							Peringatan Hari Lingkungan Hidup				0 kali			
							Sosialisasi adiwiyata				3 kali			
							Sosialisasi ProKlim				8 kali			
2	11	8	2.01	2			Bimtek Pemulihan lahan			23,85 %	0 kali	40,25 %	4.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Verifikasi Lokasi Hibah Tanaman	Cakupan Konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>24.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>							<b>24.000.000</b>		
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 aduan	6,98%	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 surat	6,98%	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>							<b>11.032.051.000</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Sampah</b>							<b>11.032.051.000</b>		
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sampah	Fasilitasi Adipura Jumlah laporan pengelolaan sampah Penyusunan IKPS	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan,	47,99%	1 paket 1 dokumen 1 Paket	45 angka 1-100	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola Lomba Bank Sampah Lomba TPS3R sosialisasi / bintek / pelatihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Semua Kelurahan Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,99%	26 orang 1 paket 1 paket 12 kali	45 angka 1-100	405.000.000	Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Alat yang dipelihara Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras Jumlah kendaraan yang dikelola Jumlah mechanical electrical yang dibeli Jumlah pengelola penanganan sampah yang dikelola Pengadaan alat penanganan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,99%	209 unit 0 paket 0 paket 33 unit 0 paket 201 orang 1 Paket	45 angka 1-100	6.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Fasilitasi gerakan pungut sampah Jumlah Bank Sampah yang dibina Jumlah bantuan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah Jumlah TPS3R yang dibina	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,99%	2 kali 30 kelompok 2 paket 27 kelompok	45 angka 1-100	3.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
							Pembentukan Bank Sampah kantor dan sekolah			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Lahan TPST yang dibeli	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Borobudur, Semua Kelurahan	47,99%	0 paket	45 angka 1-100	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Bank Sampah Induk dibangun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,99%	1 unit	45 angka 1-100	4.294.001.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Jumlah kontener sampah dibeli	2 unit									
				Jumlah PDU dibangun	1 unit									
				Jumlah Rumah kompos dibangun	1 unit									
<b>TOTAL</b>												<b>25.789.119.101</b>		

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan cara mengendalikan pembangunan dan berusaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. *Amar ma'ruf* dilaksanakan dengan mengajak konservasi sumber daya alam, mengelola sampah dengan benar agar menjadi berkah, mendidik masyarakat dan anak sekolah mengelola lingkungan serta berusaha mengelola ruang terbuka hijau. *Nahi munkar* dilaksanakan melalui membina dan mengawasi penataan aturan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, polusi dan sumber gas rumah kaca serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran.

Pada Tahun 2022, DLH mengusulkan pencermatan ulang Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan berdasarkan Undang-undang dan peraturan baru terutama Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. DLH pada Tahun 2022 menyusun naskah Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). DLH juga memfasilitasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Magelang.

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penataan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya dengan sasaran dan aturan jelas mengacu standar PROPER dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PROPER adalah program pemeringkatan usaha dan/atau kegiatan berdasar ketaatan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup (Kategori taat adalah Biru, Hijau dan Emas adapun Tidak taat adalah merah dan hitam).

Tabel 04.02 Usaha dan kegiatan yang diawasi secara aktif

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA</b>	<b>JENIS KEGIATAN / USAHA</b>
1	PT. JAWA EXPRESS AMANDAINDAH	Hotel Amanjiwo
2	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Industri Obat Tradisional sari Sehat
3	PT CIOMAS ADISATWA	Pemotongan Unggas
4	RSU KAB. MAGELANG	Pelayanana Kesehatan
5	CV. ARCON	Pembuatan Genteng Pres
6	HOTEL LOSARI COFFE PLANTATION / PT. LUPITA AMANDA (MESASTILLA)	Hotel
7	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Perusahaan Tenun
8	PT. RETOTA SAKTI	Kerajinan tenun
9	PT. PANDATEX	Industri Textil
10	RSU N-21 GEMILANG	Pelayanan Kesehatan
11	PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER	Industri Penyamaan Kulit
12	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Bengkel Tabung Gas LPG 3 kg
13	PT. SENGON KONDANG NUSANTARA	Pengolahan Kayu Sengon
14	PT. MEKAR ARMADA JAYA (ARTOS)	Plaza dan Hotel
15	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Industri Karoseri
16	PT. CITRA SENGON PERKASA	Industri Pengolahan Kayu
17	CV. KURNIA KULIT ABADI	Industri Penyamakan Kulit



<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA</b>	<b>JENIS KEGIATAN / USAHA</b>
18	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Industri pengolahan Kayu
19	PT. RAMIN MINERAL	Industri Pupuk
20	PT. SIDOAGUNG FARM	Industry Makanan Ternak
21	PT. KAYU LIMA SENTOSA	Industri Pengolahan Kayu
22	CV. TRI SAKTI	Industri Karoseri
23	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Industri Karoseri Agustus
24	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT II	Industri Pengolahan Kayu
25	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT I	Industri Pengolahan Kayu
26	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Industri Pengolahan Kayu
27	CV. SIDO DADI	Industri Pengolahan Kayu
28	CV. SEMBODO JOYO	Pembangunan Industri Pengolahan Kayu
29	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA DAN MEKAR JAYA ABADI	Industri Pengolahan Kayu
30	CV. AGUS JATI	Industri Pengolahan Kayu
31	PT. KAYU LIMA UTAMA	Industri Pengolahan Kayu
32	PLATARAN RESORT DAN SPA BOROBUDUR	Jasa Pariwisata (Hotel Resort, Restaurant, Lounge dan SPA)
33	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Industri Pengolahan Kayu
34	PT. ANUGERAH ABADI MAGELANG	Pembangunan Pabrik Garment
35	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Industri Keripik Singkong
36	PT. PAPERTECH INDONESIA	Industri Kertas Karton
37	PT. DASAR KARYA UTAMA	Industri Payung dan pengolahan Kayu
38	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	Penjemuran sisik Ikan
39	DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG	UPTD Rumah Sakit (RS) Merah Putih Kabupaten Magelang
40	PT. BISI INTERNASIONAL Tbk.	Farm Riset dan Marketing Tanaman Pangan
41	RUMAH SAKIT TIPE D AISYIYAH MUNTILAN	Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat
42	PT. DJOHAR	Operasional Usaha dan/atau Industri Tekstil
43	PT. RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO	Jasa Pelayanan Kesehatan

Selain pengawasan aktif, diharapkan juga pelaksanaan pengawasan pasif berdasarkan laporan rutin dokumen lingkungan. Saat ini persentase pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasar dokumen lingkungan hidup yang dimiliki usaha dan kegiatan termasuk kurang. Diharapkan adanya peningkatan pemberian sanksi dan pengawasan bagi usaha yang kurang aktif melaporkan pengelolaan lingkungan hidupnya. Dengan pengawasan baik aktif

maupun pasif diharapkan terdapat 10 usaha dan/atau kegiatan yang mentaati pengelolaan pencemaran udara dari 34 usaha dan/atau kegiatan target. Selain itu diharapkan terdapat 19 usaha dan/atau kegiatan mentaati pengendalian pencemaran air dari 50 usaha dan/atau kegiatan yang ditarget.

Peran laboratorium lingkungan hidup diharapkan dapat lebih optimal. Pemanfaatan kemampuan laboratorium lingkungan dalam hal pengawasan dan penentuan rona awal usaha dan/atau kegiatan diharapkan dapat ditingkatkan. Saat ini laboratorium lingkungan belum mendapatkan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Diharapkan dapat mulai untuk mempersiapkan menambah kemampuan pengujian yang diakreditasi sehingga dapat mengajukan registrasi paling tidak saat di assesment ketiga pada Tahun 2023.

Diharapkan pembinaan terhadap sekolah adiwiyata pada Tahun 2022 sebanyak 25 sekolah sehingga mencapai total 160 sekolah yang dibina. Target hasil pembinaan 25 sekolah tersebut adalah dicapainya 10 sekolah adiwiyata baru. Total desa Proklamasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 21 Desa. Diharapkan teregistrasi 5 Desa Proklamasi baru setiap tahunnya. Akibat keterbatasan anggaran, diharapkan dapat menambah peran Bank Pohon dalam melaksanakan konservasi vegetative mata air dan daerah resapan air. Dalam pelaksanaan konservasi, Dinas Lingkungan Hidup menguatkan kearifan lokal Komunitas Jogo Tuk.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) difokuskan untuk menambah cakupan pengelolaan RTH Publik. Pada Tahun 2022 direncanakan pemanfaatan pengelolaan RTH di sekitar perkotaan Mertoyudan dan Secang. Pada tahun 2022 juga diusahakan penetapan luasan RTH yang sesuai dengan kondisi real perkotaan pada Perda RTRW yang baru.

Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama bidang dan UPTD Pengelolaan Sampah. Bidang bertanggungjawab terutama pada pengurangan sampah dan penyediaan sarana pengelolaan sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan melalui Bank Sampah dan TPS3R baik di Desa, Sekolah dan Kawasan. UPTD bertanggungjawab terutama untuk penanganan sampah. menjadi kerja besar bagi penanganan sampah akibat penuhnya TPA Pasuruan, perlu untuk merevitalisasi TPSS dan Rumah Kompos. Diharapkan pasar dan kawasan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara optimal. TPSS direvitalisasi dengan penjagaan, penjadwalan dan pemilahan optimal.

**4.2 Prakiraan maju pendanaan perangkat daerah**

Pada tahun 2023 sudah diperkirakan penurunan signifikan dampak pandemic Covid 19. Diharapkan adanya peningkatan fokus penggunaan anggaran daerah, tidak hanya pada kesehatan namun juga pengelolaan lingkungan hidup. Hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengoperasian Pusat Daur Ulang di Tegalrejo dan Rumah Kompos di Deyangan untuk mengurangi beban sampah ke TPA Pasuruan.

Tabel 04.03 Prekiraan Maju Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					Tolok Ukur	Target					
2											
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
2	11									31.957.414.840	
2	11	1								8.598.413.840	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
2	11	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					21.000.000	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	12.000.000
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	4.000.000
				Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun							
				Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun							
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	5.000.000
				Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun							
				Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
							tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)				
							Jumlah dokumen SP yang tersusun				
							Jumlah SOP yang tersusun				
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>8.113.013.840</b>
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	8.028.013.840
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	85.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>10.000.000</b>
2	11	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian <u>kinerjanya</u>	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	10.000.000
						Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>100.000.000</b>
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100.000.000
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana					
						Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana					
						Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>80.000.000</b>
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah surat yang dikelola	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan	100 %	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	70.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>274.400.000</b>
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	197.000.000
				Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara							
2	11	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah mebeleur/perengkapan yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.400.000
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah alat/mesin yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	10.000.000
2	11	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Luas gedung kantor yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	65.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>300.000.000</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>						<b>200.000.000</b>
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Penetapan RPPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100 %	150.000.000
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun (IKPLHD dan IKLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100 %	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Tolok Ukur	Target		
								diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>						<b>100.000.000</b>	
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang tersusun Jumlah Dokumen KLHS RDTR yang tersusun	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100 %		100.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>1.365.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>615.000.000</b>	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen kualitas air yang dibuat Jumlah dokumen kualitas udara yang dibuat Jumlah rekomendasi/ijin/pertek air limbah dan/atau emisi yang dikeluarkan Jumlah usaha/kegiatan pencemar yang dibina Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	36,18%		125.000.000
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	36,18%		50.000.000
2	11	3	2.01	3			Jumlah Bahan Kimia/			36,18%		440.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>250.000.000</b>
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Bimtek/pelatihan Jumlah Parameter yang Terakreditasi Jumlah Sistem yang dikelola	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	36,18%	250.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>500.000.000</b>
2	11	3	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kajian pengendalian pencemaran air Jumlah sarpras PPA yang diadakan Jumlah verifikasi hibah/bansos yang dilaksanakan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	36,18%	500.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>						<b>3.400.000.000</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>						<b>3.400.000.000</b>
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Publik yang terkelola	Jumlah bahan konstruksi pengelola RTH Jumlah bahan kontruksi pengelola RTH yang di beli Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH Jumlah bibit tanaman yang di beli	Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase RTH Publik yang terkelola	25,80%	2.400.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH Publik yang terkelola	jumlah mechanical electrical yang di beli Jumlah pengelola RTH Publik yang di kelola Pembangunan RTH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase RTH Publik yang terkelola	25,80%	1.000.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>						<b>1.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>						<b>100.000.000</b>
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi  Persentase pelaporan pengelolaan limbah B3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan	100%	100.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>900.000.000</b>
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan	Pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah B3 medis Jumlah kerjasama dengan pengelola limbah B3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan	100%	900.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>						<b>150.000.000</b>



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	11	6	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>150.000.000</b>	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	jumlah sosialisasi Persentase fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	100 %	100.000.000
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi dokumen lingkungan  Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	100 %	50.000.000
2	11	7			<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>					<b>250.000.000</b>	
2	11	7	2.01		<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>					<b>100.000.000</b>	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Cakupan konservasi jogo tuk	Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Cakupan konservasi jogo tuk	12,43 %	100.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2.02</b>		<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>						<b>150.000.000</b>
2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Cakupan konservasi jogo tuk	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk Jumlah orang yang dilatih Jumlah orang yang disosialisasi Jumlah pohon yang ditanam dari bank pohon	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Cakupan konservasi jogo tuk	12,43 %	150.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>						<b>250.000.000</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>250.000.000</b>
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Bintek adiwiyata Bintek proklim Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sosialisasi adiwiyata Sosialisasi ProKlim	Cakupan Konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan Iklim	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	24,57 %	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Bimtek Pemulihan lahan Verifikasi Lokasi Hibah Tanaman	Cakupan Konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	24,57 %	150.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>100.000.000</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>						<b>100.000.000</b>
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	100 %	30.000.000
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	100 %	70.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>						<b>16.544.001.000</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Sampah</b>						<b>16.544.001.000</b>
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sampah	Fasilitasi Adipura Jumlah laporan pengelolaan sampah Penyusunan IKPS	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase pengelolaan sampah	53,50%	100.000.000
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola Lomba Bank Sampah Lomba TPS3R sosialisasi / bintek / pelatihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase pengelolaan sampah	53,50%	325.000.000
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Alat yang dipelihara Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase pengelolaan sampah	53,50%	6.300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
					Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras				
							Jumlah kendaraan yang dikelola				
							Jumlah mechanical electrical yang dibeli				
							Jumlah pengelola penanganan sampah yang dikelola				
							Pengadaan alat penanganan sampah				
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Fasilitasi gerakan pungut sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase pengelolaan sampah	53,50%	525.000.000
							Jumlah Bank Sampah yang dibina				
							Jumlah bantuan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah				
							Jumlah TPS3R yang dibina				
							Pembentukan Bank Sampah kantor dan sekolah				
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Lahan TPST yang dibeli	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase pengelolaan sampah	53,50%	5.000.000.000
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Bank Sampah Induk dibangun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase pengelolaan sampah	53,50%	4.294.001.000
							Jumlah kontener sampah dibeli				
							Jumlah PDU dibangun				
							Jumlah Rumah kompos dibangun				
<b>TOTAL</b>											<b>31.957.414.840</b>

## **BAB V. P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam pembahasan rapat konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan. Pembiayaan dan sumber dana mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Baik melalui peran serta lingkungan hidup Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kalangan Swasta. Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas.

Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang. Oleh sebab itu pembahasannya membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki sifat yang dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi Dinas Lingkungan Hidup dan hasil musrenbang.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2022 menjadi acuan kerja bagi unit-unit pelaksanaan di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Rancangan awal ini menjadi acuan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum SKPD. Unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target menyukseskan visi sejahtera berdaya saing dan amanah.

Pada akhirnya, kiranya Alloh, SWT, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan terutama untuk Kabupaten Magelang dan Indonesia yang kita cintai ini.

Kota Mungkid, 28 Oktober 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGELANG


  
 SARIFUDIN, SH  
 NIP. 19670212 199312 1 001